

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan dan masyarakat atau publik yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai tercapainya akuntabilitas. Hubungan keagenan (*agency relationship*) dapat digambarkan dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah (Rosalin, 2011).

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini adalah menjelaskan pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakilwakilnya.

Teori keagenan dalam penelitian ini juga dapat menjelaskan pertanggung jawaban pemerintah menyajikan informasi laporan keuangan yang mudah diakses bagi para pengguna laporan keuangan seperti akses melalui media dan website

resmi pemerintah (situs internet). Selain itu, teori keagenanan dalam penelitian ini menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah harus diawasi dengan internal kontrol system agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa penyajian laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan aturan yang ada dan untuk kepentingan publik yang tidak hanya disampaikan kepada DPRD saja tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat memperoleh informasi laporan keuangan tersebut. Kinerja yang baik dari pemerintah daerah akan berdampak pada kepercayaan publik. Sebagian besar agen lebih "tertutup" dan cenderung tidak mengambil risiko, namun pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap informasi didalam laporan keuangan dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan (Yusrianti, 2015)

### **2.1.2 Teori Sinyal**

Teori Sinyal menjelaskan mengenai alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi mengenai perusahaan (Tjandrakirana dan Meva, 2014). Dari perspektif publik, teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan signal yang baik kepada masyarakat. Pemerintah mendapat tekanan dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan pencapaian-pencapaian pemerintah (Ratmono, 2015).

Signalling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh (Ross), menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Hal positif dalam signalling theory dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki "berita bagus" dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka, sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang

kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar (Wolk dan Tearney dalam Dwiyantri, 2010).

Teori signal merupakan pengembangan dari teori keagenan dimana teori ini berkaitan dengan hubungan antara manajemen dan penerima informasi yang menunjukkan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan, berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan tersebut.

Kaitannya dari teori signal dengan penelitian ini adalah dalam teori signal dijelaskan mengenai pentingnya pemberian informasi yang harus diberikan kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam hal ini yaitu pemerintahan itu sendiri sedangkan pihak luar yaitu DPRD, bawasda dan masyarakat. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah yang dapat menjadi signal bagi pihak luar, terutama bagi pihak yang berkepentingan adalah laporan tahunan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua pengguna informasi keuangan tentunya memerlukan informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah tersebut. Sehingga pengguna informasi keuangan dapat mengukur transparansi dan akuntabilitas.

### **2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Menurut Bastian (2010) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik, menurut Mardiasmo (2018) adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawabannya, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Chrytiana (2017) Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode periode sebelumnya yang dilakukan secara periodic

Wahida (2015) Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggung jawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

### **2.1.3.1 Dimensi Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi public yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik;
2. Akuntabilitas proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya;
3. Akuntabilitas program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal;

4. Akuntabilitas kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dapat disimpulkan bahwa dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik ialah Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, Akuntabilitas Kebijakan.

#### **2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas**

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, dan perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas ialah harus ada komitmen, berorientasi pada pencapaian visi, misi dan harus jujur, objektif, transparan agar setiap karyawannya dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga tujuan akan tercapai.

#### **2.1.4 Penyajian Laporan Keuangan**

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I, menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan

oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik

Penyajian laporan keuangan catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode akuntansi yang berguna untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan tersebut. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP No. 71/2010.

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode akuntansi yang berguna untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan tersebut dan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.

#### **2.1.4.1 Tujuan laporan keuangan**

Dalam sebuah laporan keuangan tentu terdapat tujuan dari laporan keuangan dan berikut adalah tujuan laporan keuangan menurut Nordiawan (2010) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan terdiri dari :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Dapat disimpulkan bahwa Tujuan laporan keuangan merupakan sebagai menyediakan suatu informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang memiliki manfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

#### **2.1.4.2 Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan**

Menurut PP 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, seperti :

##### **1. Relevan**

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan seperti :

- a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu
- b. Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini
- c. Tepat Waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan
- d. Lengkap  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

### a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

### b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh

### c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

## 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik laporan keuangan yaitu apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan

setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dapat di pahami oleh pengguna.

### **2.1.5 Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut (Wardaha, 2016) Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari stakeholder.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapat informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah (Apriliani, et al., 2015). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Aliyah dan Nahar, 2012) .

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan dan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik.

Fauziah (2017) menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dengan memenuhi hal berikut :

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
2. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Accesible, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website).

Dapat disimpulkan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dengan memenuhi Keterbukaan, kemudahan dan Accesible.

#### **2.1.6 Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Menurut Luthans Komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

Menurut Greenberg & Baron. Komitmen organisasi adalah derajat dimana karyawan terlibat dalam organisasinya dan berkeinginan untuk tetap menjadi anggotanya, dimana didalamnya mengandung sikap kesetiaan dan kesediaan karyawan untuk bekerja secara maksimal bagi organisasi tempat karyawan tersebut bekerja.

Menurut Menurut Stephen P. Robbins Komitmen Organisasi adalah keterlibatan pekerjaan yang tinggi yaitu memihak terhadap pekerjaan spesifik seseorang, sedangkan komitmen organisasional yang tinggi yaitu memihak organisasi yang merekrut seseorang tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah kemauan yang kuat untuk bekerja dan berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi atau visi, misi dan tujuan organisasi. dimana didalamnya mengandung sikap kesetiaan dan kesediaan karyawan untuk bekerja secara maksimal bagi organisasi tempat karyawan tersebut bekerja.

#### **2.1.6.1 Aspek-Aspek Komitmen Organisasi**

Dalam komitmen organisasi adanya aspek komitmen organisasi sangat penting untuk menumbuhkan komitmen anggota dalam rangka pencapaian tujuan baik organisasi maupun anggota itu sendiri. Berikut ini terdapat beberapa aspek-aspek komitmen organisasi menurut Steers (1985, h.53)

##### 1. Identifikasi

Identifikasi yang berwujud dalam bentuk kepercayaan anggota terhadap organisasi. Guna menumbuhkan identifikasi dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi/organisasi, sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para anggota atau dengan kata lain organisasi memasukan pula kebutuhan dan keinginan anggotan dalam tujuan organisasi atau organisasi. Hal ini akan menumbuhkan suasana saling mendukung di antara para anggota dengan organisasi. Lebih lanjut membuat anggota dengan rela menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran bagi tercapainya tujuan organisasi;

##### 2. Keterlibatan

Keterlibatan atau partisipasi anggota dalam aktivitas-aktivitas kerja penting untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan anggota menyebabkan mereka bekerja sama, baik dengan pimpinan atau rekan kerja. Cara yang dapat dipakai untuk memancing keterlibatan anggota adalah dengan memasukan mereka dalam berbagai kesempatan pembuatan keputusan yang dapat menumbuhkan keyakinan pada anggota bahwa apa yang telah diputuskan adalah keputusan bersama. Juga anggota merasakan bahwa mereka diterima sebagai bagian dari organisasi, dan konsekuensi lebih lanjut, mereka merasa wajib untuk melaksanakan bersama apa yang telah mereka putuskan, karena adanya rasa keterikatan dengan apa yang mereka ciptakan. Hasil yang dirasakan bahwa tingkat kehadiran anggota yang memiliki rasa keterlibatan tinggi umumnya akan selalu disiplin dalam bekerja;

##### 3. Loyalitas

Loyalitas anggota terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seseorang untuk bisa melanggengkan hubungannya dengan organisasi kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apa pun. Keinginan anggota untuk mempertahankan diri bekerja dalam organisasi adalah hal yang dapat menunjang komitmen anggota terhadap organisasi di mana mereka bekerja. Hal ini di upayakan

bila anggota merasakan adanya keamanan dan kepuasan dalam tempat kerjanya.

Dapat di simpulkan bahwa aspek-aspek komitmen organisasi berguna untuk menumbukan komitmen anggota dalam rangka pencapaian tujuan baik organisasi maupun anggota itu sendiri. Aspek-aspek tersebut ialah Identifikasi, kelibatan dan loyalitas.

### **2.1.6.2 Dimensi Komitmen Organisasi**

Dikarenakan komitmen organisasi bersifat multidimensi, maka terdapat perkembangan untuk tiga model komponen yang di ajukan oleh Mayer dan Allen (2009) Ketiga dimensi tersebut yakni :

1. Komitmen Efektif "*Affective Commitment*"  
Komitmen ini mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Orang-orang ingin terus bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka sependapat dengan tujuan dan nilai dalam organisasi tersebut. Orang-orang dengan tingkat komitmen afektif yang tinggi memiliki keinginan untuk tetap berada di organisasi karena mereka mendukung tujuan dari organisasi tersebut dan bersedia membantu untuk mencapai tujuan tersebut;
2. Komitmen Berkelanjutan "*Continuance Commitment*"  
Komitmen ini mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang untung dan rugi dimana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Semakin lama karyawan tinggal dengan organisasi mereka, semakin mereka takut kehilangan apa yang telah mereka investasikan di dalam organisasi selama ini;
3. Komitmen Normatif "*Normative Commitment*"  
Komitmen ini mengacu pada perasaan karyawan dimana mereka diwajibkan untuk tetap berada di organisasinya karena adanya tekanan dari yang lain. Karyawan yang memiliki tingkat komitmen normatif yang tinggi akan sangat memperhatikan apa yang dikatakan orang lain tentang mereka jika mereka meninggalkan organisasi tersebut. Mereka tidak ingin mengecewakan atasan mereka dan khawatir jika rekan kerja mereka berpikir buruk terhadap mereka karena pengunduran diri tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dimensi komitmen organisasi ialah Komitmen Efektif mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi, Komitmen Berkelanjutan mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut dan komitmen Normatif mengacu pada perasaan karyawan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian Jenis Data (Studi Kasus)	Hasil
1	Dika Kurniawan, Sri Rahayu (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram )	<b>Y1</b> : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah <b>X1</b> : Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah <b>X2</b> : Aksesibilitas Laporan Keuangan  – Data Primer : Kuesioner – analisis regresi linier berganda – Sekretariat Daerah Kota Mataram	1. penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif, dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2	Miftahul Reza Fauziya, Nur Handayani (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap ap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan	<b>Y</b> : Akuntabilitas Keuangan Daerah <b>X1</b> : Penyajian Laporan Keuangan Daerah <b>X2</b> : Aksesibilitas Laporan Keuangan  – Data Primer : Kuesioner	1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan

		Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– analisis regresi linier berganda</li> <li>– SKPD Kota Surabaya</li> </ul>	signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3	Intan Permatahati, Putri (2018)	Pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat kabupaten (PPK SKPK), Keterampilan, Pengawasan Internal, Komitmen Organisasi dan Komitmen stakeholder terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	<p><b>Y1</b> : Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah</p> <p><b>X1</b> : pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat kabupaten (PPK SKPK),</p> <p><b>X2</b> : Keterampilan</p> <p><b>X3</b> : Pengawasan Internal</p> <p><b>X4</b> : Komitmen Organisasi</p> <p><b>X5</b> : Komitmen stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Data Primer : Kuesioner</li> <li>– analisis regresi linier berganda</li> <li>– OPD Kabupaten Kudus</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>2. Keterampilan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>3. Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>4. Komitmen Organisasi</li> </ol>

				berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 5. Komitmen stakeholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4	Peggy Sunde (2013)	Pengaruh Penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	<p><b>Y</b> : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah</p> <p><b>X1</b>: Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p><b>X2</b>: Penyajian Laporan Keuangan Daerah</p> <p>– Data Primer Kuesioner</p> <p>– Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji f dan uji t.</p> <p>– SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p>1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p>
5	Anies Iqbal Mustofa (2012)	Pengaruh Penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas laporan keuangan	<p><b>Y</b> : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah</p> <p><b>X1</b>: Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p><b>X2</b>: Penyajian</p>	1. penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

		terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Pematang	<p>Laporan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Data Primer : Kuesioner</li> <li>– analisis regresi linier berganda</li> <li>– Kabupaten Pematang</li> </ul>	<p>2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>3. penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
6	Salomi J. Hehanussa (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p><b>Y</b> : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p><b>X1</b> : Penyajian Laporan Keuangan</p> <p><b>X2</b> : Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Data Primer : Kuesioner</li> <li>– analisis regresi linier berganda</li> <li>– Kota Ambon</li> </ul>	<p>1. Penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Ambon berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan.</p> <p>2. aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan</p>

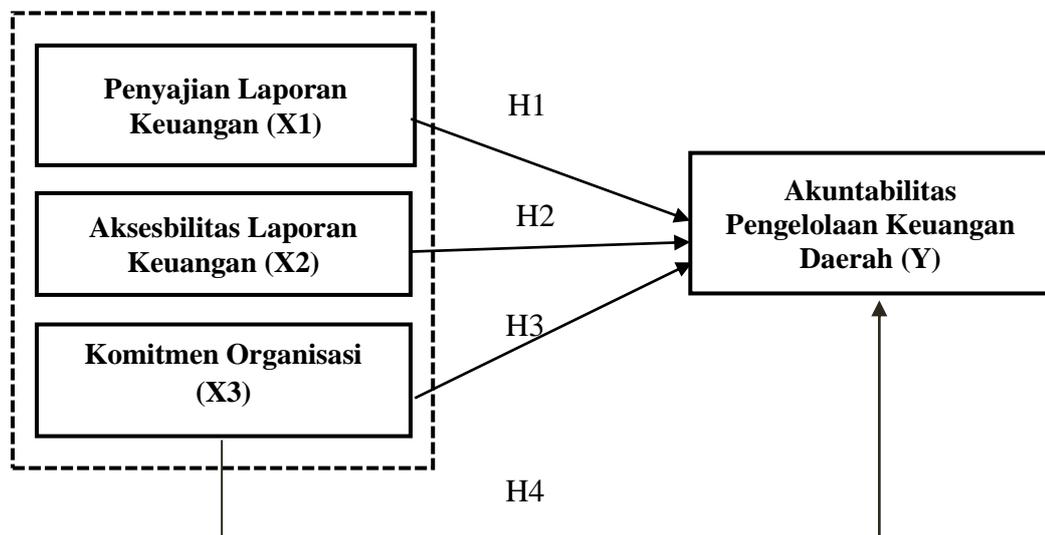
				keuangan daerah.
7	Putu Sri Wahyuni , Ni Luh Gede Erni Sulindawati , Nyoman Trisna Herawati. (2014)	Pengaruh Penyajian Laporan dan Aksesibilitas laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Bandung)	<p><b>Y</b> : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p><b>X1</b> : Penyajian Laporan Keuangan</p> <p><b>X2</b> : Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p>– Data primer : kuesioner.</p> <p>– analisis berganda, uji t, dan uji f</p> <p>– SKPD pemerintahan kabupaten Bandung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</li> <li>3. penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas laporan keuangan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</li> </ol>
8	Handayani (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	<p><b>Y</b> : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan</p> <p><b>X1</b> : Kompetensi Aparatur</p> <p><b>X2</b> : Komitmen Organisasi</p> <p><b>X3</b> : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan</p> <p>– Data Primer : Kuesioner</p> <p>– analisis regresi linear</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Kabupaten Klaten.</li> <li>2. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas</li> </ol>

			berganda. – Kabupaten Klaten.	pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Kabupaten Klaten. 3. Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Kabupaten Klaten
--	--	--	----------------------------------	---

Sumber: *Data diolah 2020*

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2019), menyatakan bahwa “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset”.



Sumber: *Data diolah (2020)*

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar tersebut, maka peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Kerangka pemikiran pada Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan OPD Kota Palembang

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Hehanussa, 2015). Penelitian yang dilakukan Hehanussa (2015), penyajian laporan keuangan secara empiris terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut didukung oleh penelitian *Dika Kurniawan, Sri Rahayu* (2018), bahwa Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut.

H1 : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## 2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.

Rohman (2009), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Disisi lain, Mulyana (2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Aliyah dan Nahar (2012) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.. Hasil tersebut di dukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Anies Iqbal Mustofa 2012, bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut.

H2 : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## 3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah

Komitmen organisasi adalah tingkat sampai sejauh mana keberpihakan seseorang terhadap organisasi dan tujuannya, serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Lubis, 2010). Sedangkan Muslih (2011: 70) mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan persetujuan dari semua pihak di dalam suatu organisasi mengenai pedoman dan pelaksanaan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Penelitian yang dilakukan *Lesli L Aimbu, David P E Saerang, Hendrik Gamaliel (2018)* menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengeloaan keuangan daerah. Hasil tersebut di dukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019) bahwa

variabel Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut.

H3 : Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Komitmen Organisasi secara simultan terhadap dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012), Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Miftahul Reza Fauziya, Nur Handayani, hasil dari penelitian menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lesli L Aimbu, Davud P E Seareng dan Hendrik Gamaliel membuktikan bahwa secara bersama sama gaya kepemimpinan transformasional, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi , penggunaan SIMDA keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut.

H4 : Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.